

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM DESA PRENEUR DALAM
PENGEMBANGAN UMKM DI KALURAHAN KEMIRI, KAPANEWON
TANJUNGSARI, KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Maria rosa mustika lefteuw¹, Hanantyo Sri Nugroho², Mohammad Suyanto³, Dodi Setiawan Riatmaja⁴

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Amikom Yogyakarta, Sleman, Indonesia

³Program Studi Informatika Universitas Amikom Yogyakarta, Sleman, Indonesia

⁴Program Studi Kewirausahaan Universitas Amikom Yogyakarta, Sleman, Indonesia

mariarosamustikalefteuw@students.amikom.ac.id¹, hanantyo@amikom.ac.id^{2*},
msuyanto@amikom.ac.id³, dodiatmaja@amikom.ac.id⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan pemerintah kalurahan dalam pengembangan UMKM dan untuk mengetahui proses serta faktor-faktor pendukung dan kendala dalam pelaksanaan pengembangan UMKM. Hasil penelitian ini menjelaskan intervensi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Kemiri berwujud pada mengintegrasikan seluruh unit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada satu wadah yang bernama Desa Preneur dan di bawah komando Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Terkhusus pada pelaksanaan program desa preneur sendiri diharapkan mampu menjadi program yang bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi di kalurahan kemiriyakni dengan Peran pemerintah kalurahan Kemiri untuk membantu akses pelaku UMKM diwujudkan dalam bentuk acara-acara atau event. Melakukan pameran tersendiri, fasilitasi produk untuk pameran. Mewadahi berbagai produk nantinya pada show room atau griya UMIKM yang berada di latar ombo. Kendala yang dihadapi Pemerintah Kalurahan Kemiri dalam pelaksanaan pengembangan UMKM berupa kucuran dana guna lebih membantu dan lebih cepat mengerakan roda perekonomian masyarakat dan percepatan pembangunan wadah UMKM. Selain itu, kerjasama dengan pihak ketiga yang dirasa sulit untuk dilakukan.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, desa preneur, pengembangan UMKM

ABSTRACT

This research aims to explain the District Government's policy in developing MSMEs and to determine the process and supporting factors and obstacles in implementing MSME development. The results of this research explain the policy intervention carried out by the Kemiri District Government in the form of integrating all micro, small and medium enterprise (MSME) units in one forum called Preneur Village and under the command of Village-Owned Enterprises (BUMDesa). In particular, the implementation of the preneur village program itself is hoped to be able to become a program that is beneficial for economic growth in the Kemiri sub-district, namely by the role of the Kemiri sub-district government in helping MSMEs access it in the form of events. Conducting separate exhibitions, facilitating products for exhibitions. Accommodating various products later in the show room or UMIKM house which is in the ombo background. The obstacle faced by the Kemiri District Government in implementing the development of MSMEs is in the form of disbursing funds to help more and more quickly move the wheels of the community's economy and accelerate the development of MSME platforms. Apart from that, collaboration with third parties is considered difficult to carry out.

Keywords: policy implementation, preneur village, MSME development

PENDAHULUAN

Dalam Daya tahan sektor UMKM menyelamatkan pelaku ekonomi Indonesia dari ketergantungan pada modal asing. Selain itu, keberfungsian modal sosial Membantu menggerakkan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Kalurahan kemiri juga banyak memiliki potensi dalam bidang usaha atau UMKM yakni bisnis, seperti tepung mocaf, kripik olahan biji-bijian seperti peyek, lemet, olahan labu kuning, bakpia, kerajinan, emping mlinjo, olahan dari singkong seperti rengginang, krecek telo dan juga yang terbaru adalah kerajinan batik sekar sogo. Dengan berbagai potensi yang ada, tentunya diperlukan sebuah pendekatan mengenai bagaimana para pelaku UMKM ini dapat tetap produktif, berkembang, dan maju sebagai penggerak ekonomi desa. Pemerintah kalurahan diharapkan mampu bekerjasama dengan Dinas Koperasi terkait dalam pengembangan UMKM dikalurahan kemiri sendiri. Untuk mengembangkan maupun menumbuhkan perekonomian dikalurahan kemiri sendiri pemerintah kalurahan bekerja sama dengan diskop untuk bersama-sama mengembangkan UMKM yang ada dikalurahan kemiri dengan membuat program dimana dengan program ini mampu membantu pelaku-pelaku usaha UMKM dalam mengembangkan usaha mereka melalui pengadaan fasilitas , pelatihan maupun modal program yang dibuat ini merupakan kebijakan pemerintah kalurahan kemiri agar supaya unit-unit usaha kecil di kalurahan kemiri dapat belajar dalam hal pemasaran, pakaging, maupun pelatihan-pelatihan lainnya sehingga persoalan-persoalan yang dihadapi para pelaku usaha dpar produktif dan menambah nilai ekonomis .program tersebut adalah Desa Preneur. Tujuan dari kerjasama antara pemerintah dalam memberikan Program Desa Preneur untuk memberikan sosialisasi dan pelatihan untuk mengembangkan UMKM yang ada pada Kalurahan Kemiri sehingga pelaku UMKM mudah dalam hal pengemasan, pemasarannya.

Selain itu, pemerintah kurang memberikan pelatihan dan sosialisasi terhadap pelaku UMKM untuk bisa lebih maju dalam mengembangkan UMKM dalam program Desa Preneur dan tidak hanya itu terbatasnya modal untuk pelaksanaan kebijakan ini masih terbilang sangat kurang sehingga fasilitas maupun pelatihan yang diberikan menjadi kurang optimal .melihat dari Tujuan Desa Preneur sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan potensi usaha ekonomi masyarakat yang berkelanjutan, meningkatkan semangat kewirausahaan dan kualitas sumber daya manusia para pelaku UMKM, menekan kerentanan sosial ekonomi untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran melalui pemberdayaan ekonomi produktif secara berkelanjutan. Salah satu Program Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Desa Preneur untuk meningkatkan kemampuan ekonomi desa dan mendorong percepatan pembangunan ekonomi di daerah perdesaan, masyarakat masih menghadapi masalah orientasi pembangunan ekonomi yang tidak merata. ekonomi perdesaan tidak tumbuh secara cepat seperti di kota. sebaliknya, perdesaan juga memiliki potensi ekonomi yang bagus jika di kelola dengan cara yang bijak, tepat, kreatif, dan berkelanjutan. sehingga dengan melihat fakta yang ada dilapangan peneliti ingin melihat bagaimana implementasi kebijakan desa preneur ini dalam mengembangkan UMKM dan sejauh mana program desa preneur ini sudah berdampak bagi para pelaku UMKM maupun masyarakat serta bagaimana Pemerintah dapat mengimplementasikan atau melaksnakan kebijakan ini dengan baik dan mampu mengembangkan UMKM di kalurahan kemiri melauai kegiatan, maupun pemberian fasilitas bagi para pelaku UMKM di kalurahan kemiri dan kemajuan perekonomian di Kalurahan Kemiri sendiri.

Di Indonesia, pertumbuhan UMKM terus meningkat sebagai hasil dari dukungan pemerintah yang kuat terhadap usaha mereka. Ini sangat penting untuk mengantisipasi perekonomian ke depan dan menjaga dan memperkuat struktur perekonomian nasional. UMKM sendiri sangat berperan penting kepada masyarakat seperti peningkatan ekonomi dan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, tentunya sangat bagus bagi perkemabangan usaha-usaha kecil yang ada di desa. Akan tetapi, hal itu tentunya diperlukan dukungan dari pemerintah

dimana pemerintah juga ikut dalam upaya pengembangan UMKM di desa yakni dengan membuat program maupun kebijakan yang dituangkan dalam berbagai bentuk program atau kegiatan pemberdayaan dimana hal tersebut dapat menjadi wadah maupun tempat belajar para pelaku UMKM untuk bisa mengembangkan usaha yang mereka miliki melalui satu tempat atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Menurut Istamto (1996), ada tiga tugas utama yang paling penting untuk menyelesaikan program implementasi kebijakan:

- a. Organisasi, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit, dan metode untuk menjalankan program
- b. Interpretasi, menafsirkan bahwa dalam hal status program seringkali menjadi rencana dan instruksi yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan
- c. Penerapan, kebijakan biasa untuk pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Dengan mempertimbangkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah proses menerapkan konsep, prosedur, atau berbagai aktivitas baru dengan harapan bahwa orang lain akan menerimanya dan membuat perubahan dalam sistem birokrasi untuk mencapai tujuan yang dapat dicapai dengan bantuan kelompok pelaksana yang dapat dipercaya. Cara agar kebijakan dapat mencapai tujuan terkait dengan implementasi kebijakan. Konsep implementasi kebijakan mengatakan bahwa implementor harus tahu apa yang harus dilakukan agar membuat kebijakan tidak salah. Selain itu, untuk mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan, kelompok sasaran harus diberitahukan tentang tujuan dan sasaran kebijakan. Pelaksanaan kebijakan memiliki sifat seperti komitmen, kejujuran, dan demokratis dalam komunikasi mereka dengan organisasi yang berkaitan dengan pelaksanaan. Jika pelaksanaan kebijakan memiliki sifat atau karakter yang baik, maka akan melaksanakan kebijakan secara efektif sesuai dengan tujuan dan keinginan pembuat kebijakan.

Kebijakan UMKM adalah serangkaian tindakan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga lainnya untuk mendukung, memfasilitasi, dan produktivitas UMKM, sehingga dapat meningkatkan kontribusi perekonomian dan pengurangan kemiskinan. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah salah satu sektor penting dalam perekonomian yang membutuhkan dukungan dan regulasi pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan publik dapat berpengaruh pada UMKM karena pelaku UMKM dapat mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh UMKM, seperti akses keuangan yang terbatas, masalah regulasi, dan kurangnya akses seperti keuangan yang terbatas, masalah regulasi, dan kurangnya akses ke pasar. Kebijakan publik juga dapat membantu meningkatkan keberlanjutan sosial dan lingkungan UMKM. Akibatnya, hubungan antara kebijakan publik dan UMKM sangat penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait harus bekerja sama dengan pelaku UMKM untuk membuat kebijakan publik yang tepat, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan sektor UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Desa Preneur Dalam Pengembangan UMKM Di Kalurahan Kemiri, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024.

Desa Preneur memiliki kemampuan untuk mengembangkan unit usaha skala desa yang diusahakan oleh warganya sendiri dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan berwirausaha, meningkatkan kualitas produk dan jasa, meningkatkan nilai tambah, dan meningkatkan daya saing. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian desa. Desa Preneur dibangun dalam Lima tahap, dengan tiga tahap utama didukung oleh kelompok Desa Kemiri yang ada (Profil Desa Kemiri, 2021). Berikut adalah tahapan yang dimaksud:

- a. Tahapan Embrio atau Penumbuhan adalah tahap utama pertama. Ini adalah tahapan pengenalan atau pendalaman potensi desa dan pemahaman dinamika tatakelola wirausaha.

Tahap ini juga mencakup identifikasi potensi usaha dan tatakelola usaha (produksi, potensi pasar, dan kelembagaan).

- b. Tahapan kedua, pengembangan adalah pengembangan bisnis melalui strategi usaha dan manajemen pemasaran yang baik.
- c. Tahap ketiga, maju yakni berfokus pada pengembangan bisnis dan pengembangan kemitraan dan jaringan.
- d. Tahap keempat, pelepasan dan pembinaan untuk mengetahui bagaimana usaha mempengaruhi ekonomi lokal atau desa.
- e. Tahap kelima, kelanjutan upaya untuk kebijakan selanjutnya.

Kalurahan Kemiri yang terletak di Kabupaten Gunungkidul sendiri merupakan salah satu kalurahan yang memiliki banyak pelaku UMKM yang berpotensi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemerintah kalurahan telah berkontribusi secara tidak langsung pada pembangunan ekonomi masyarakat melalui UMKM dan telah ikut serta dalam pembentukan kebijakan dalam hal perencanaan, program, kegiatan, dan sarana prasarana hingga akses pasar. Dalam mengembangkan usaha kecil memerlukan akses informasi yang kuat dimana sebuah sektor bisnis ekonomi bisa berkembang di sebuah wilayah (kecamatan tertentu). Jika dapat menerapkan pengaturan manajemen dengan baik, maka UMKM dapat bertahan dan kompetitif. Pengaturan manajemen biasanya mencakup pemasaran, pembuatan, sumber daya manusia, dan keuangan. Pengembangan keterampilan kewirausahaan dan kemampuan untuk mendirikan usaha kecil dan menengah (UMKM) dibantu melalui program pengembangan UMKM. Para peserta dididik untuk menerapkan keahlian kewirausahaan, menentukan dan memilih proye bisnis yang cocok atau memperluas bisnis saat ini, dan dengan hati-hati membuat proposal perencanaan bisnis atau suatu program untuk di presentasikan ke lembaga keuangan. Tujuannya untuk mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut: (1). Menciptakan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan; (2). Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjadi sistem usaha yang tangguh dan mandiri; (3). Meningkatkan peran dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengetasan kemiskinan (Hasri, 2014).

Menurut Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No.20 tahun 2022, Desa Preneur diizinkan untuk menumbuhkan unit usaha skala desa yang diusahakan oleh warganya sendiri dengan tujuan meningkatkan perekonomian desa dan tercapainya kesejahteraan hidup warganya melalui penguatan pengetahuan dan keterampilan berwirausaha, peningkatan kualitas produk atau jasa, nilai tambah, dan daya saing. Lembaga ekonomi desa seperti UMKM, Koperasi, dan BUMDES harus berpatisipasi secara aktif. Sehingga dapat membentuk konsorsium untuk memasarkan barang dan jasa yang dibuat oleh masyarakat. Strategi pemasaran berfokus pada penciptaan dan pengembangan merek barang dan jasa desa. Sehingga Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pelaku UMKM kurangnya pelatihan dan sosialisasi dari pemerintah kalurahan dalam pengembangan UMKM, dapat membantu para pelaku UMKM yang masih minim dalam pemasaran dan pengemasan produk UMKM. Dapat belajar dan mampu mengembangkan usahanya. Semua usaha mikro yang ada di Kalurahan dapat termasuk dalam program desa preneur yang dibuat oleh pemerintah Kalurahan. Ini akan membuat satu wadah untuk mengembangkan UMKM dan memberantas kemiskinan di Kalurahan Kemiri. Desa Preneur dapat meningkatkan ekonomi Masyarakat. Desa Preneur dapat menumbuhkan unit usaha skala desa yang di usahakan oleh warga desa melalui penguatan pengetahuan dan keterampilan berwirausah, peningkatan kualitas produk atau jasa, nilai tambah, dan daya saing dengan tujuan meningkatkan perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Program Desa preneur dalam pengembangan UMKM di kalurahan kemiri memiliki hambatan dan tantangan yang di hadapi oleh pemerintahan kalurahan dalam mengembangkan UMKM yaitu masih kurangnya optimalnya kurangnya

biaya dalam mengembangkan desa preneur. Pada era yang semakin kompetitif ini, langkah penting untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan UMKM adalah meningkatkan kualitas produk, kualitas tenaga kerja, dan akses pasar. Menurut Agustina (2016) mengungkapkan bahwa indikator dalam pengembangan UMKM meliputi:

- a. Peningkatan kualitas produk: UMKM harus berfokus pada meningkatkan kualitas produk yang mereka buat. Ini dapat dicapai dengan meningkatkan proses produksi, menggunakan bahan berkualitas tinggi, dan mengadopsikan teknologi yang tepat. Dengan meningkatkan kualitas produk, UMKM dapat memperoleh kepercayaan pelanggan dan meningkatkan daya saing di pasar.
- b. Peningkatan kualitas SDM: UMKM harus mempertimbangkan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Dengan memiliki tenaga kerja yang berkualitas tinggi, mereka dapat mengoptimalkan proses produksi, meningkatkan efisiensi, dan lebih baik beradaptasi dengan perubahan pasar. Ini dapat dicapai dengan memberikan Pendidikan dan pelatihan yang tepat.
- c. Meningkatkan Akses Pasar: UMKM harus memiliki akses pasar yang lebih baik. Ini dapat dicapai dengan menerapkan strategi pemasaran yang efektif, menggunakan platform digital untuk memperluas jangkauan, dan menjalin kemitraan dengan pihak lain dalam rantai nilai. Dengan memiliki akses pasar yang lebih luas, UMKM dapat meningkatkan penjualan dan berkembang.

Daya tahan sektor UMKM menyelamatkan pelaku ekonomi Indonesia dari ketergantungan pada modal asing. Selain itu, keberfungsian modal sosial membantu menggerakkan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Kalurahan kemiri juga banyak memiliki potensi dalam bidang usaha atau UMKM yakni bisnis, seperti tepung mocaf, kripik olahan biji-bijian seperti peyek, lemet, olahan labu kuning, bakpia, kerajinan, emping mlinjo, olahan dari singkong seperti rengginang, krecek telo dan juga yang terbaru adalah kerajinan batik sekar sogo. Dengan berbagai potensi yang ada, tentunya diperlukan sebuah pendekatan mengenai bagaimana para pelaku UMKM ini dapat tetap produktif, berkembang, dan maju sebagai penggerak ekonomi desa. Pemerintah kalurahan diharapkan mampu bekerjasama dengan Dinas Koperasi terkait dalam pengembangan UMKM dikalurahan kemiri sendiri. Untuk mengembangkan maupun menumbuhkan perekonomian dikalurahan kemiri sendiri pemerintah kalurahan bekerja sama dengan diskop untuk bersama-sama mengembangkan UMKM yang ada dikalurahan kemiri dengan membuat program dimana dengan program ini mampu membantu pelaku-pelaku usaha UMKM dalam mengembangkan usaha mereka melalui pengadaan fasilitas, pelatihan maupun modal program yang dibuat ini merupakan kebijakan pemerintah kalurahan kemiri agar supaya unit-unit usaha kecil di kalurahan kemiri dapat belajar dalam hal pemasaran, packaging, maupun pelatihan-pelatihan lainnya sehingga persoalan-persoalan yang dihadapi para pelaku usaha dapat produktif dan menambah nilai ekonomis. Program tersebut adalah Desa Preneur. Tujuan dari kerjasama antara pemerintah dalam memberikan Program Desa Preneur untuk memberikan sosialisasi dan pelatihan untuk mengembangkan UMKM yang ada pada Kalurahan Kemiri sehingga pelaku UMKM mudah dalam hal pekejingnya, pemasaran.

Pada dasarnya, membangun UMKM adalah tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Dengan mempertimbangkan tantangan yang dihadapi oleh UMKM, upaya diperlukan untuk: (a). menciptakan iklim usaha yang baik, (b). memberikan bantuan permodalan, (c). melindungi usaha atau bisnis, (d). membangun kolaborasi, (e). memberikan pelatihan, (f). meningkatkan promosi, dan (g). Menciptakan kerjasama yang setara (Alyas & Rakib, 2017). Serta pemerintah kurang memberikan pelatihan dan sosialisasi terhadap pelaku UMKM untuk bisa lebih maju dalam mengembangkan UMKM program Desa Preneur dan tidak hanya itu terbatasnya modal untuk pelaksanaan kebijakan ini masih terbilang sangat kurang sehingga fasilitas maupun pelatihan yang diberikan menjadi kurang optimal. melihat

dari Tujuan Desa Preneur sendiri adalah untuk: (1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan potensi usaha ekonomi masyarakat yang berkelanjutan, (2) meningkatkan semangat kewirausahaan dan kualitas sumber daya manusia para pelaku UMKM, (3) menekan kerentanan sosial ekonomi untuk menurunkan angka kemiskinan dan Pengangguran melalui pemberdayaan ekonomi produktif secara berkelanjutan. Salah satu Program Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Desa Preneur untuk meningkatkan kemampuan ekonomi desa dan mendorong percepatan pembangunan ekonomi di daerah perdesaan, masyarakat masih menghadapi masalah orientasi pembangunan ekonomi yang tidak merata. Ekonomi perdesaan tidak tumbuh secara cepat seperti di Kota. Sebaliknya, perdesaan juga memiliki potensi ekonomi yang bagus jika di kelola dengan cara yang bijak, tepat, kreatif, dan berkelanjutan. Sehingga dengan melihat fakta yang ada dilapangan peneliti ingin melihat bagaimana implementasi kebijakan desa preneur ini dalam mengembangkan UMKM dan sejauh mana program desa preneur ini sudah berdampak bagi para pelaku UMKM maupun masyarakat serta bagaimana Pemerintah dapat mengimplementasikan atau melaksanakan kebijakan ini dengan baik dan mampu mengembangkan UMKM di kalurahan kemiri melalui kegiatan, maupun pemberian fasilitas bagi para pelaku UMKM di kalurahan kemiri dan kemajuan perekonomian di Kalurahan Kemiri sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program Desa Preneur dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Kemiri, Kapanewon Tanjung Sari, Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024.

LITERATURE REVIEW

1. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik untuk mengembangkan program desa preneur, kebijakan pemerintah Kalurahan Kemiri dalam mengembangkan UMKM adalah dengan adanya keputusan lurah kemiri nomor 14A/ KPTS/2022 Tentang Pengangkatan Pengurus Desa Preneur Kalurahan kemiri, kalurahan mengambil keputusan untuk membentuk pengurus program desa preneur, dengan adanya kerjasama dengan Dinas Koperasi dan Pemerintah Kalurahan Kemiri maka program desa preneur ini sangat berguna bagi masyarakat (pelaku UMKM) sehingga dapat berkumpul disatu program yaitu desa preneur dan membentuk sebuah kelompok. Kebijakan administrator dalam mengatur penerapan kebijakan yang telah dipilih untuk diimplementasikan, dikenal sebagai implementasi kebijakan. Menurut Riant Nugroho (2017) kebijakan adalah keputusan pemerintah yang dibuat oleh seseorang yang memegang kekuasaan baik fomal maupun tidak infomal.

Cart J Foderick mendefinisikan kebijakan berupa serangkaian tindakan kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Agusino, 2012). Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari defenisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. Untuk mengukur berhasil tidaknya suatu implementasi kebijakan, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III (Winarno, 2008) dimana menjelaskan ada empat variable dalam kebijakan publik yaitu:

- a. Komunikasi
- b. Sumber daya
- c. Sikap
- d. Struktur birokrasi

2. Pengembangan UMKM Pada Program Desa Preneur

Menurut Geoffrey G. Meredith (1996) bahwa wirausaha atau entrepreneur adalah orang

atau sekelompok orang yang mempunyai kemampuan melihat kesempatan peluang bisnis dengan mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil keuntungan dari sumberdaya itu, serta mengambil tindakan yang tepat, guna memastikan kesuksesan. Menurut Seelos dan Manir (2004), terdapat tiga definisi kewirausahaan sosial (Sociopreneur), antara lain mengacu pada organisasi nirlaba yang mencari pembiayaan keuangan dari pemerintah, perusahaan atau pihak lain, serta mengacu pada pengurangan masalah sosial. terdapat sesuatu yang merupakan tanggung jawab sosial dalam bisnis tertentu. Hal ini menekankan pada pemecahan permasalahan sosial inovatif. Kewirausahaan sosial terdiri dari empat elemen utama antara lain:

- a. Social Value. Nilai ini menekankan pada penciptaan manfaat sosial. Penekanan pada nilai ini adalah masalah lingkungan, ekonomi, kesehatan dan pendidikan.
- b. Civil Society. Hal ini berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam kewirausahaan sosial, sebuah kewirausahaan sosial membutuhkan peran masyarakat luas untuk mengoptimalkan modal sosial yang ada.
- c. Innovation. Komponen inovasi tidak dapat dipisahkan dari kewirausahaan sosial. Inovasi ini terdiri dari berbagai macam, antara lain inovasi model bisnis, inovasi produksi, pemasaran dan inovasi dalam upaya penyelesaian permasalahan yang ada.
- d. Economic Activity. Pelaksanaan kewirausahaan sosial diharapkan dapat menciptakan keseimbangan kegiatan bisnis dengan kegiatan sosial.

Menurut Kusuma dan Purnamasari (2016), kewirausahaan desa adalah usaha yang dilakukan dengan mengorganisir struktur ekonomi perdesaan melalui pemanfaatan aset desa berupa sumber daya alam dan manusia sebagai modal pengembangan wirausaha baru yang dijalankan secara kolaboratif oleh segenap unsur desa.

Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sebuah bisnis yang dioperasikan oleh individu, rumah tangga, atau badan usaha berskala kecil. Usaha mikro kecil menengah (UMKM) adalah strategi penting untuk memperkuat struktur ekonomi nasional. Krisis ekonomi nasional saat ini sangat berdampak pada stabilitas ekonomi, politik, dan nasional. Bisnis besar terkena dampak, tetapi usaha kecil dan koperasi (UMKM) tetap dapat beroperasi. Tujuan umum adalah untuk membangun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tangguh, mandiri, dan memiliki daya saing tinggi. Umum kecil dan menengah (UMKM) ini sangat penting dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok. Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM menetapkan definisi usaha mikro dan kecil di Indonesia. Pasal 1 dari UU tersebut mengatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif yang dilakukan oleh individu atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh individu atau badan usaha perorangan. Menurut Sutanto, pengembangan UMKM melibatkan tiga aspek utama:

- a. Peningkatan kualitas peningkatan produk: UMKM harus berkonsentrasi pada meningkatkan kualitas produk yang mereka buat. Ini dapat dicapai dengan meningkatkan proses produksi, menggunakan bahan baku berkualitas tinggi, dan mengadopsikan teknologi yang tepat. Dengan meningkatkan kualitas produk, UMKM dapat memperoleh kepercayaan pelanggan dan meningkatkan daya saing di pasar.
- b. Peningkatan kualitas SDM: UMKM harus mempertimbangkan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Dengan memiliki tenaga kerja yang berkualitas, UMKM dapat mengoptimalkan proses produksi, meningkatkan efisiensi, dan menghadapi perubahan pasar dengan lebih baik. Ini dapat dicapai melalui pelatihan dan pendidikan yang relevan.
- c. Meningkatkan akses pasar: UMKM harus memiliki akses pasar yang lebih baik. Ini dapat dicapai dengan menggunakan strategi pemasaran yang efektif, menggunakan platform digital untuk memperluas jangkauan, dan menjalin kemitraan dengan pihak lain dalam

rantai nilai. Dengan memiliki akses pasar yang lebih luas, UMKM dapat meningkatkan penjualan dan berkembang.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana data yang dibutuhkan berupa data deskriptif yaitu kata-kata dan gambar. Dengan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif diharapkan dapat meniai Implimentasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan UMKM di Kalurahan Kemiri, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul. Objek dalam penelitian ini yaitu Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Umkm Di Kalurahan Kemiri, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul. Subjek penelitian merupakan sumber daya yang menjadi sasaran untuk mendapatkan data dalam penelitian ini maka yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pemerintah kalurahan kemiri yaitu lurah kelurahan kemiri, dan pengelola UMKM.

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Data tersebut mencakup hasil wawancara, dokumentasi, hasil rekaman, dan catatan lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam mengkaji Implementasi Kebijakan Dalam Pengembangan UMKM Di Kalurahan Kemiri, Kapanewon Tanjungsari, kabupaten gunungkidul yaitu wawancara, studi pustaka, teknik analisis data. Tujuan dari analisis ini adalah untuk merumuskan hasil penelitian. Analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif, yang menganalisis data lapangan berupa kata-kata secara menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan Pengembangan UMKM melalui peningkatan kualitas produk, kualitas SDM, dan akses pasar merupakan langkah penting untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan UMKM di era yang semakin kompetitif. Menurut Agustina (2016) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa indikator dalam pengembangan UMKM meliputi:

- a. Peningkatan Kualitas Peningkatan Produk. Pada saat ini produk yang di hasilkan oleh masing-masing pengelola masih sangat sedikit/minim dikarenakan sepi pengunjung dan sekitar 30 persen saja yang disiapkan untuk dipasarkan.
- b. Peningkatan Kualitas SDM. Pada peningkatan SDM hampir semua masyarakat ikut terlibat dalam mengelola UMKM ini akan tetapi hanya bebrapa saja yang masuk dalam anggota UMKM ini karena angota lainnya berdiri sendiri dan memasarkanya sendiri tanpa ikut berpartisipasi di UMKM kalurahan.
- c. Meningkatkan Akses Pasar. Di Kalurahan Kemiri sebelum adanya program dari pemerintah yaitu program Desa Preneur pelaku UMKM di Kalurahan Kemiri untuk akses pasar itu sendiri belum terlalu luas, sehingga Pemerintah Kalurahan kemiri memberikan program desa preneur untuk memberikan pelatihan- pelatihan termasuk dalam meningkatkan akses pasar, dan pemerintah bekerjasama dalam membangun sebuah wadah atau tempat pemasaran dimana untuk membantu pelaku UMKM dalam memasarkan produknya di Kalurahan Kemiri.

Realisasi implementasi kebijakan program desa preneur dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Kemiri, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul juga di pengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam mendukung implementasi kebijakan desa preneur dalam pengembangan UMKM di kalurahan kemiri, kapanewon tanjungsari, kabupaten gunungkidul. Sesuai dengan peraturan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 001.B / KEP / BID IV / I /2020 tentang pendoman pelaksanaan Desa Preneur. Dalam pelaksanaan program desa preneur ini dibentuk kepengurusan untuk membantu pemerintah dalam menjalankan desa preneur dan juga untuk

membantu para pelaku UMKM dalam proses mulai dari pendidikan, pelatihan dan pendampingan wirausaha. Terdapatnya keterlibatan pengurus UMKM dikalurahan kemiri mendukung dalam pencapaian faktor-faktor implementasi kebijakan desa preneur.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan

Pertama, faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan adalah faktor komunikasi. Factor komunikasi dalam proses implementasi kebijakan desa preneur terlihat dari tersedianya ruang komunikasi antara pemerintah, pelaku UMKM maupun narasumber. Dimana dengan komunikasi ini tersedianya forum pertemuan, sosialisasi, pelatihan maupun proses evaluasi dengan menyesuaikan kebutuhan para pelaku UMKM, mampu berinteraksi aktif dan saling kerjasama antara pemerintah dan pelaku UMKM. Dalam hal ini komunikasi yang diberikan adalah pemerintah kalurahan kemiri mengadakan pertemuan setiap seminggu sekali di balai kalurahan atau biasanya di showroom UMKM latar ombo yang terletak tidak jauh dari balai kalurahan kemiri. Setiap seminggu sekali para pelaku UMKM melakukan pelatihan bersama narasumber seperti pelatihan pengemasan, pemasaran, maupun *branding* produk. Pada pertemuan tersebut para pelaku UMKM dapat berkomunikasi maupun belajar secara langsung bersama narasumber yang telah disediakan oleh pemerintah kalurahan. Selain itu, terdapat pengurus desa preneur yang juga merupakan pelaku UMKM yang ikut dalam memberikan pelatihan bagi para pelaku UMKM yang masih belajar.

Dalam pertemuan-pertemuan yang dilakukan ini tentunya menambah komunikasi baik antara pelaku UMKM dengan pemerintah sehingga dengan hal ini dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan program sendiri maupun pelaku UMKM sendiri dimana para pelaku UMKM dapat belajar banyak hal tentang *branding* produk agar dapat berkembang dan sukses. Keunggulan dari proses komunikasi adalah dengan proses komunikasi ini mampu meningkatkan pemahan tentang program desa preneur seperti melalui proses sosialisasi maupun pertemuan lainnya sehingga para pelaku UMKM pahan tentang proses-proses pelaksanaan UMKM juga dapat menambah kerjasama antara pemerintah dengan pelaku UMKM memberikan ruang komunikasi yang baik sehingga dapat bekerja sama dalam memajukan desa preneur kedepannya. Kelemahan dari proses komunikasi adalah perlu waktu cukup lama untuk mencapai tujuan dimana penyampaian-penyampaian yang dilakukan bisa saja belum bisa diterima sepenuhnya oleh para pelaku UMKM sehingga tentunya perlu proses-proses komunikasi yang lebih sering dilakukan dalam penyampaian program maupun pelaksanaan program desa preneur.

Kedua, faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan adalah sumber daya. Dalam hal ini realisasi sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Kemiri, Kabupaten Gunungkidul, bahwa pelaksana program desa preneur dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Gunungkidul menerima dukungan Dinas-Dinas (Diskop DIY), dan organisasi non- pemenrintah. Selain itu, sumber daya keuangan program desa preneur dalam pemgenbangan UMKM di Kalurahan Kemiri, Kabupaten Gunungkidul yang diprioritaskan untuk pembangunan dimana melalui Dana Diskop DIY (Dinas Koperasi). Dana ini terkait dengan fasilitas yaitu showroom. Dalam hal ini pemerintah kalurahan kemiri telah membangun showroom UMKM untuk para pelaku UMKM memasarkan produk mereka.

Selain itu, pemeritah kalurahan kemiri juga membangun ruko untuk para pelaku UMKM melakukan usaha, dimana para pelaku UMKM dapat menyewa dengan harga murah dengan ruko tersebut sehingga produk mereka dapat terjual, ketika pada saat pengunjung atau wisatawan melewati daerah kemiri. Hal ini dikarenakan kalurahan kemiri sendiri berada di jalan lintas wisata pantai di Gunungkidul, sehigga dengan memanfaatkan situasi yang ada tentunya dapat berdampak bagi para pelaku UMKM. Pada saat ini, terdapat pengusaha yang sukses seperti contohnya usaha tepung mocaf. Pelaku usaha mocaf juga ikut bergabung dalam

keanggotaan desa preneur. Dampak usaha tepung mocaf adalah memberikan dukungan bagi para pelaku UMKM dan juga para petani terutama di sektor bahan baku singkong. Selain itu, terdapat juga sektor kerajinan anyaman, dimana produk-produk yang dipasarkan sampai luar negeri. Tentunya, hal ini bagus dalam kemajuan program desa preneur sendiri sehingga degan dihadapkannya pelaku-pelaku usaha yang cukup sukses.

Selain itu, dalam program desa preneur juga tersedia kepengurusan yang sangat membantu pemerintah dalam menjalankan program. Kepengurusan berasal dari pelaku usaha sendiri agar dapat menjalin komunikasi yang baik dengan saling berbagi dan memberi semangat sehingga usaha mereka dapat maju bersama-sama. Kelebihan dari faktor sumber daya adalah melihat potensi-potensi yang ada maupun ketersediaan sumber fasilitas yang ada di kalurahan kemiri. Selain itu, sumber kewenangan yang dimiliki pemerintah kalurahan dalam memajukan desa sendiri tentunya sudah cukup dalam mengembangkan UMKM di kalurahan kemiri. Kelemahan dari faktor sumberdaya adalah sumberdaya anggaran dimana pemerintah kalurahan kemiri sendiri masih mengeluhkan modal yang kurang dalam membangun fasilitas ataupun memberikan fasilitas peralatan untuk para pelaku UMKM yang sangat kurang.

Ketiga, faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan adalah sikap pelaksanaan. Kebijakan tidak akan berhasil jika para pelaksana tidak setuju. Dalam pelaksanaan kebijakan program desa preneur dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Kemiri, Kabupaten Gunungkidul, sikap pelaksana menyebabkan persepsi, responsi, dan tidakan yang antusias dalam pelaksanaan pelaksanaan program desa preneur dalam pengembangan UMKM. Hal ini dikarenakan pelaksanaan adalah bagian dari pelaku UMKM. Sikap penugasan disusun secara hirarkis dan pemangku kepentingan terlibat. Dalam hal ini, pihak pemerintah kalurahan kemiri bekerja sama dengan pihak-pihak pengusaha atau stakeholder yang mampu memberikan edukasi bagi para pelaku UMKM tentang bagaimana berwirausaha dengan baik, bagaimana *branding* produk dengan baik, bagaimana pemasarannya dan bagaimana cara menghadapi situasi ketika terjadi permasalahan pada saat menjalankan usaha. Tentunya sangat penting adanya pihak-pihak terkait yang lebih paham situasi tentang kewirausahaan, dan pemerintah telah melaksanakan kegiatan tersebut rutin seminggu sekali setiap hari sabtu atau minggu. Keunggulan dari faktor sikap adalah mengenai keterlibatan pihak-pihak terkait seperti dinas koperasi dan stakeholder yang ada.

Kelemahan dari faktor sikap adalah tidak baik jika terus menerus bergantung kepada stakeholder yang ada maupun dari pemerintah sendiri sehingga jika terus menerus dibimbing tentunya akan berdampak ketergantungan bagi para pelaku usaha. *Keempat*, faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan adalah struktur birokrasi. Struktur birokrasi mengacu pada suatu kelompok atau organisasi yang memiliki tujuan untuk mengarahkan sumber daya dengan cara yang konsisten dan teratur. Dalam pelaksanaan kebijakan program desa preneur dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Kemiri, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, terdapat struktur dan standar prosedur operasional yang jelas dengan sistematis untuk menyelesaikan pekerjaan. Dalam faktor terakhir ini tentunya pemerintah kalurahan telah merancang atau membentuk kepengurusan khusus desa preneur yakni dengan membuat keputusan lurah kemiri nomor 14A/KPTS/2022 tentang pengangkatan pengurus desa preneur kalurahan kemiri yakni melihat dimana pada program desa preneur sendiri sudah terdapat regulasi atau keputusan yang mengatur tentang kepengurusan desa preneur, dimana dengan didampingi pemerintah kalurahan sendiri.

Kelebihan dari faktor birokrasi adalah karena dengan dibentuknya kepengurusan desa preneur di kalurahan kemiri ini dapat membantu pemerintah kalurahan kemiri dalam memantau atau melaksanakan program dengan terstruktur melalui bantuan pengurus desa preneur sendiri. Kelemahan dari faktor birokrasi adalah anggota pengurus desa preneur tentunya memiliki kegiatan sendiri dimana untuk saat ini kegiatan pertemuan maupun pelatihan kurang optimal atau tidak berjalan dengan baik karena kurangnya keaktifan dari para pengurus sendiri sehingga

hal ini menimbulkan kerugian bagi para pelaku UMKM yang menjadikan proses pembelajaran menjadi tidak optimal dan terbengkalai begitu saja.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan dalam pengembangan UMKM oleh pemerintahan kalurahan kemiri dalam program desa preneur berwujud pada mengintegrasikan seluruh usaha unit mikro kecil dan menengah UMKM pada satu wadah yang bernama desa preneur.

Pertama, faktor komunikasi, dimana proses komunikasi dalam pengimplementasian kebijakan program desa preneur terbilang berjalan dengan baik. Terlihat dari sosialisasi yang dilaksanakan pemerintah kalurahan selama 5 hari dengan menghadirkan narasumber untuk memberikan pelatihan bagi para pelaku UMKM. Selain itu, para pelaku UMKM dapat belajar banyak dari stakeholder melakukan pelatihan bersama narasumber seperti pelatihan pengemasan, pemasaran, maupun *branding* produk. Dari pertemuan tersebut, para pelaku UMKM dapat berkomunikasi maupun belajar secara langsung bersama narasumber yang telah disediakan oleh pemerintah kalurahan.

Kedua, faktor sumber daya, dimana realisasi sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Kemiri, Kabupaten Gunungkidul, bahwa pelaksana program desa preneur dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Gunungkidul menerima dukungan pemerintah, khususnya Dinas Koperasi DIY dan organisasi non-pemerintah. Selain itu, sumber daya keuangan program desa preneur dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Kemiri, Kabupaten Gunungkidul diprioritaskan untuk pembangunan dengan menggunakan dana Dinas Koperasi DIY. Hal ini terkait dengan fasilitas yaitu showroom. Dalam hal ini, pemerintah kalurahan kemiri telah membangun showroom UMKM untuk para pelaku UMKM memasarkan produk mereka. Selain itu, pemerintah kalurahan kemiri juga membangun ruko untuk para pelaku UMKM.

Ketiga, faktor sikap, sikap pelaksana menyebabkan persepsi, responsi, dan tidakan yang antusias dalam pelaksanaan kebijakan program desa preneur dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Kemiri, Kabupaten Gunungkidul. Hal ini dikarenakan pelaksanaan adalah bagian dari pelaku UMKM. Pelaksanaan program desa preneur pemerintah telah menghadirkan pihak-pihak yang ahli dalam memberikan masukan program desa preneur. Artinya, pihak pemerintah kalurahan kemiri bekerja sama dengan pihak-pihak pengusaha atau stakeholder dengan memberikan edukasi bagi para pelaku UMKM.

Keempat, faktor birokrasi, dimana pemerintah kalurahan telah merancang atau membentuk kepengurusan khusus desa preneur yakni dengan membuat keputusan lurah kemiri nomor 14A/KPTS/2022 tentang pengangkatan pengurus desa preneur kalurahan kemiri. Pada pengimplementasian kebijakan program desa preneur dalam pengembangan UMKM cukup berjalan dengan baik dimana dilihat dari pendapat-pendapat para pelaku UMKM yang mengungkapkan bahwa hadirnya program desa preneur ini cukup berpengaruh dapan pengembangan usaha mereka. Hal ini ditandai dengan kenaikan produksi dan juga konsumen yang cukup signifikan.

Para pelaku usaha UMKM merasakan bahwa kenaikan tersebut dihasilkan melalui ruang-ruang yang tersedia seperti pelatihan dan pendampingan. Dampak Program Desa Preneur dalam Pengembangan UMKM Di Kalurahan Kemiri, yakni dampak sebelum dan sesudah pelaksanaan program desa preneur terlihat pada bentuk acara pameran dan fasilitas produk untuk pameran. Program desa preneur ini sangat berdampak positif bagi para pelaku UMKM terutama pada branding dan pemasaran. Hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan program desa preneur, yakni berupa permodalan, bahan baku serta pemasaran. Selain itu, kerjasama yang dirasakan masih ada beberapa yang sulit untuk dilakukan. Saran pada penelitian ini adalah pemerintah kalurahan terus mensinergikan para pelaku UMKM dan mengaktifkan para

pengurus desa preneur, membuat saluran khusus pada website kalurahan, serta pelatihan manajemen bisnis tetap dilaksanakan bagi para pelaku UMKM.

Referensi

- Agustina, T. dkk, (2016). “Kajian Tentang Faktor Internal Dan Eksternal Yang Mendukung Pengembangan Usaha Produk Unggulan Lokal Sulam Dan Bordir Kabupaten Malang” ISBN 978-602-6428-04-2
- Agustino, L. (2012). Dasar-dasar Kebijakan publik. Bandung: Alfabeta.
- Alyas, & Rakib, M. (2017). Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan (Studi Kasus pada Usaha Roti Maros di Kabupaten Maros). *Sosiohumaniora*, 114-120.
- Hasri, B., Santoso, S., & Santoso, T. (2015). Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Daerah di Kabupaten Ngawi. Ngawi: Magister Pendidikan Ekonomi Program Pascasarjana UNS.
- Istamto, R. 1996. Pengantar Kebijakan Publik, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Kusuma, H. and Purnamasari, N. (2016). Baseline Research Membangun Gerakan Desa Wirausaha. Yogyakarta.
- Nugroho, R. (2017). Public Policy: Dinamika kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan (Edisi Keen). Jakarta: Gramedia.
- Pujiati, dan Rufaida, E. (2017). Kisah Perjalanan Para Pemula Wirausahawan di Bumi Lampung. Lampung: Program Studi Magister Pendidikan IPS – UNILA
- Seelos, C. and Mair, J. (2004) Social Entrepreneurship: The Contribution of Individual Entrepreneurs to Sustainable Development. IESE Business School, University of Navarra, Navarra, Spain.
- Winarno, Budi. (2008). Kebijakan Publik (teori dan proses). Jakarta: Media Pressindo.